



## PANDANGAN MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2021 FISIP UMRAH TERKAIT KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Fahriana Nur Anita<sup>1</sup>, Putri Dia Sari<sup>2</sup>, Taliana Tantri<sup>3</sup>, Alwan Alfiansyah<sup>4</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: [fahriananuranita1@gmail.com](mailto:fahriananuranita1@gmail.com)

### Info Artikel

#### Article History:

Submitted: 16-11-2021

Accepted: 16-06-2022

Published: 28-06-2022

#### Kata Kunci:

Kebijakan;  
Pandemi Covid-19;  
Vaksinasi.

#### Keyword:

Policy;  
Covid-19 Pandemic;  
Vaccination.

#### Abstrak:

Pandemi Covid-19 disebabkan oleh menyebarnya Coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Karena pandemi ini pemerintah turun tangan untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah pengadaan vaksinasi. Vaksin dinilai sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular. Oleh karena itu topik ini menarik untuk diteliti karena banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pandangan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 FISIP UMRAH terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 78 orang dan sampel yang diambil sebesar 38% dari populasi yang ada, yaitu 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket. Didapati hasil bahwa pengadaan vaksinasi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif yang diberikan oleh para responden.

#### Abstract:

The Covid-19 pandemic was caused by the spread of a new type of Coronavirus named SARS CoV-2. The Covid-19 outbreak was first detected in Wuhan City, Hubei Province, China on December 1, 2019, and was designated a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. Due to this pandemic, the government intervened to provide policies in dealing with the Covid-19 pandemic. One of the policies carried out by the government is the procurement of vaccinations. Vaccines are considered the most effective and economical way to prevent infectious diseases. Therefore, this topic is interesting to examine because of the many pros and cons of the government's vaccination policy in dealing with the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to find out about the views of State Administration Science students batch 2021 FISIP UMRAH on the Covid-19 vaccination policy in Indonesia. The research method used is quantitative analysis method with a population of 78 people and a sample of 38% of the existing population, which is 30 people. The data collection technique used is the distribution of questionnaires. It was found that the procurement of vaccinations had been carried out quite well by the government. This is evidenced by the positive response given by the respondents.

## PENDAHULUAN

Ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan tentunya kita harus memberikan sebuah jawaban yang berbentuk keputusan, sebelum kita memberikan jawaban tentunya juga ada pilihan kita untuk bertindak partisipatif aktif atau bertindak pasif, maka ada banyak pilihan apabila ingin membuat sebuah keputusan. Di dalam dunia politik, Joyce Mitchell mengatakan dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* bahwa “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau membuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”, dapat kita lihat dengan jelas bahwa politik itu sudah menjadi sebuah aktivitas untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepada kepentingan umum yang dilahirkan dalam bentuk sebuah kebijakan umum.

Di setiap negara memiliki sistem yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan akan ada teori-teori yang dianut oleh pemerintahnya dan hal tersebut akan sangat mempengaruhi pada kualitas dan tingkat keluasan dari pemerataan dalam menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Akan ada berbagai tantangan bagi pihak-pihak yang mengambil keputusan dan melahirkan kebijakan umum, baik sebelum terciptanya kebijakan umum sebagai hasil dari sebuah keputusan, hingga pasca pembentukan kebijakan umum.

Menurut buku *Kamus Administrasi Publik* (Chandler dan Plano, 1998:107) public policy (kebijakan publik) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sehingga dapat kita artikan bahwa kebijakan publik itu adalah sebuah efisiensi dan keakuratan dalam penggunaan sumberdaya, baik berbentuk sumberdaya alam atau sumberdaya manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan terdapat dalam masyarakat atau pemerintah sendiri.

Dewasa ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi guna meminimalisir penyebaran virus SARS-CoV-2. Penanganan Covid-19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin Covid-19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin Covid-19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga sebagai respon dimana semua negara berlomba-lomba memperebutkan vaksin ini agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali (Ihsanuddin, 2020).

The emergency committee telah menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 dapat dihentikan jika dilakukan proteksi, deteksi dini, isolasi, dan perawatan yang cepat agar tercipta implementasi sistem yang kuat untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Mengingat hal ini, sebagai upaya proteksi terhadap Covid-19, berbagai negara dari seluruh dunia telah berkomitmen bersama dengan melibatkan pemerintah, perusahaan bioteknologi, ilmuwan, dan akademisi untuk dapat menciptakan vaksin Covid-19. Sejauh ini telah banyak kandidat vaksin yang diluncurkan untuk melawan virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan (game changer) dalam upaya memerangi pandemi Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Sikap optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas penyebaran Covid-19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil nantinya.

Soal vaksin Covid-19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi Covid-19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; Budiardjo, 2008). Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa (Maclver, 1926 dalam Budiardjo, 2008).

Berangkat dari pemikiran di atas, peneliti melakukan penelitian dengan tema “Pandangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2021 FISIP UMRAH Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia” guna mengetahui persepsi masyarakat terkait kebijakan vaksinasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, populasinya meliputi seluruh mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjumlah 78 orang. Peneliti mengambil sampel sebesar 38% dari seluruh populasi yang ada, yaitu sebanyak 30 orang saja (15 orang dari kelas IAN A dan 15 orang dari kelas IAN B).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penyebaran angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup. Penelitian ini dilakukan melalui platform online dengan menggunakan aplikasi Google Form dengan laman web <https://bit.ly/KuesionerVaksinCorona> yang disebar melalui media sosial WhatsApp.

Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliabel. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan pilihan "Ya" atau "Tidak".

Penelitian ini dilakukan selama dua hari mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat (28-29 Oktober 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandemi Covid-19 diperkirakan akan terus menimbulkan beban morbiditas dan mortalitas yang sangat besar sementara sangat mengganggu masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Pemerintah harus siap untuk memastikan akses dan distribusi vaksin Covid-19 dalam skala besar dan adil jika dan ketika vaksin yang aman dan efektif tersedia (Makmun and Hazhiyah 2020). Diperlukan kapasitas sistem kesehatan yang memadai, serta strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan penerimaan vaksin dan bagi mereka yang akan melaksanakan vaksinasi.

Vaksinasi Covid-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19 (SatgasCovid-19, 2020a). Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi (Hakam, 2021).

Pengembangan vaksin dimulai dari tahapan dasar, yang dikenal dengan istilah tahap eksploratori. Biasanya berlangsung 2-4 tahun dan bertujuan untuk mengidentifikasi antigen alamiah atau buatan, yang dapat memberikan sinyal pada tubuh terhadap patogen berbahaya. Fase pre-klinik pada hewan untuk memastikan vaksin aman untuk dilakukan uji pada manusia. Terdapat 3 fase uji klinik pada manusia: Fase I biasanya dilakukan pada 100 relawan bertujuan untuk menilai keamanan pada manusia. Fase II biasanya dilakukan pada 100-500 relawan dan bertujuan untuk mengetahui dosis, jadwal, cara pemberian dan kemungkinan efek samping jangka pendek. Fase III dilakukan pada 1000-5000 relawan untuk memastikan keamanan dan efikasi pada kelompok yang lebih besar. Ketika semua tahapan

pengembangan telah dilaksanakan dan hasilnya pun baik maka selanjutnya dilaksanakan proses persetujuan oleh BPOM, sebelum diproduksi dalam jumlah besar.

Instruksi presiden untuk program vaksinasi Covid-19, yaitu :

- a. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
- b. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
- c. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
- d. Presiden menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19.
- e. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.



**Gambar 1. Presiden sebagai Orang Pertama yang Menerima Vaksin**

Sumber: <https://images.bisnis-cdn.com/posts/2021/01/14/1342808/antarafoto-presiden-divaksin-covid-19-130121-ho-2.jpg> (2021)

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksin direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Aspek legal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, adalah sebagai berikut :

- a. Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 99 Tahun 2020.
- b. Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
- c. Kepmenkes No. 12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- d. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- e. Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pelayanan vaksinasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Berbasis fasilitas kesehatan untuk pelayanan publik.
- b. Kementerian/lembaga/badan usaha/institusi yang memiliki fasilitas kesehatan di institusinya, maka vaksinasi dilayani di fasilitas kesehatan masing-masing.
- c. Vaksinasi massal terpusat di gedung-gedung.
- d. Vaksinasi mobile terpusat di tempat keramaian.
- e. Mobilisasi sasaran dengan dikoordinasi oleh fasyankes atau Kementerian/lembaga/badan usaha/institusi.

Untuk memperoleh data tentang Pandangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021 FISIP UMRAH tentang Vaksinasi Covid-19, penyusun menggunakan metode angket dengan menyebarkan link Google Form yang berisi 10 pertanyaan kepada 30 sampel penelitian yang ada. Angket tersebut disusun dalam bentuk pilihan, dengan 2 alternatif jawaban.

Berikut paparan data hasil angket yang telah diisi oleh responden :

**Tabel 1. Jawaban Responden**

No.	Pertanyaan	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Total
1	Apakah Anda sudah melakukan vaksinasi?	29	1	30
2	Apakah Anda takut untuk menerima vaksinasi?	2	28	30
3	Apakah penyelenggaraan vaksinasi bisa mencegah paparan Covid-19 secara efektif?	26	4	30
4	Apakah akses untuk mendapatkan vaksinasi di daerah Anda terbilang cukup mudah?	29	1	30
5	Apakah masyarakat di daerah Anda berantusias untuk melakukan vaksinasi?	28	2	30
6	Apakah instansi pemerintah di daerah Anda secara langsung turun ke lapangan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi?	25	5	30
7	Apakah Anda yakin dengan kapasitas pelayanan kesehatan di daerah Anda untuk dapat mengatasi efek samping pemberian vaksinasi yang mungkin timbul?	28	2	30
8	Menurut Anda, apakah setelah melakukan vaksinasi bisa menyebabkan rapid test reaktif?	14	16	30
9	Apakah semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia sudah termasuk kategori halal?	24	6	30
10	Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada efek samping/masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin Covid-19?	10	20	30
<b>Total</b>		<b>215</b>	<b>85</b>	<b>300</b>

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

**Analisis dan Pembahasan :**

1. Apakah Anda sudah melakukan vaksinasi?
  - a. 96,7% dari 30 responden sudah melakukan vaksinasi.
  - b. 3,3% dari 30 responden belum melakukan vaksinasi.

Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi.
2. Apakah Anda takut untuk menerima vaksinasi?
  - a. 93,3% dari 30 responden tidak takut untuk menerima vaksinasi.
  - b. 6,7% dari 30 responden takut untuk menerima vaksinasi.

Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa mereka tidak takut untuk menerima vaksinasi.
3. Apakah penyelenggaraan vaksinasi bisa mencegah paparan Covid-19 secara efektif?
  - a. 86,7% dari 30 responden menyetujui bahwa vaksinasi bisa mencegah paparan Covid-19.

- b. 13,3% dari 30 responden tidak menyetujui bahwa vaksinasi bisa mencegah paparan Covid-19.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa penyelenggaraan vaksinasi bisa mencegah diri dari paparan Covid-19.
4. Apakah akses untuk mendapatkan vaksinasi di daerah Anda terbilang cukup mudah?
- a. 96,7% dari 30 responden menyebutkan bahwa akses untuk mendapatkan vaksinasi di daerahnya terbilang cukup mudah.
- b. 3,3% dari 30 responden menyebutkan bahwa akses untuk mendapatkan vaksinasi di daerahnya tidak cukup mudah.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa akses untuk mendapatkan vaksinasi di daerahnya terbilang cukup mudah.
5. Apakah masyarakat di daerah Anda berantusias untuk melakukan vaksinasi?
- a. 93,3% dari 30 responden mengatakan bahwa masyarakat di daerahnya sangat berantusias untuk melakukan vaksinasi.
- b. 6,7% dari 30 responden mengatakan bahwa masyarakat di daerahnya tidak begitu berantusias untuk melakukan vaksinasi.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa masyarakat di daerahnya cukup berantusias untuk melakukan vaksinasi.
6. Apakah instansi pemerintah di daerah Anda secara langsung turun ke lapangan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi?
- a. 83,3% dari 30 responden mengatakan bahwa instansi pemerintah di daerahnya secara langsung turun ke lapangan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi.
- b. 16,7% dari 30 responden mengatakan bahwa instansi pemerintah di daerahnya tidak secara langsung turun ke lapangan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden mengatakan bahwa instansi pemerintah di daerahnya secara langsung turun ke lapangan untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi.
7. Apakah Anda yakin dengan kapasitas pelayanan kesehatan di daerah Anda untuk dapat mengatasi efek samping pemberian vaksinasi yang mungkin timbul?
- a. 93,3% dari 30 responden yakin dengan kapasitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk dapat mengatasi efek samping pemberian vaksinasi yang mungkin timbul.
- b. 6,7% dari 30 responden tidak yakin dengan kapasitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk dapat mengatasi efek samping pemberian vaksinasi yang mungkin timbul.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden sudah yakin dengan kapasitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk dapat mengatasi efek samping pemberian vaksinasi yang mungkin timbul.
8. Menurut Anda, apakah setelah melakukan vaksinasi bisa menyebabkan rapid test reaktif?
- a. 53,3% dari 30 responden menyatakan bahwa jika sudah melakukan vaksinasi tidak bisa menyebabkan rapid test reaktif.
- b. 46,7% dari 30 responden menyatakan bahwa jika sudah melakukan vaksinasi bisa menyebabkan rapid test reaktif.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa jika sudah melakukan vaksinasi tidak bisa menyebabkan rapid test reaktif.
9. Apakah semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia sudah termasuk kategori halal?
- a. 80% dari 30 responden menyebutkan bahwa semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia sudah termasuk kategori halal.
- b. 20% dari 30 responden menyebutkan bahwa semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia belum termasuk kategori halal.  
Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa semua jenis vaksin yang beredar di Indonesia sudah termasuk kategori halal.
10. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada efek samping/masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin Covid-19?
- a. 66,7% dari 30 responden menyebutkan bahwa tidak ada efek samping/masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin Covid-19.
- b. 33,3% dari 30 responden menyebutkan bahwa ada efek samping/masalah kesehatan serius

yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin Covid-19.

Kesimpulan : Sebagian besar dari responden menyebutkan bahwa tidak ada efek samping/masalah kesehatan serius yang dilaporkan setelah orang menerima vaksin Covid-19.

## **SIMPULAN**

Di masa pandemi saat ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya membuat kebijakan yang dapat menjawab tantangan dan persoalan zaman, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan kebijakan vaksinasi yang saat ini diluncurkan oleh pemerintah dinilai sudah cukup baik meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban para responden menuai respon yang positif. Kebanyakan orang sudah tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi karena mereka menganggap dengan diadakannya vaksinasi bisa mencegah penyebaran virus Covid-19.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi pada penelitian ini, yaitu kepada mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku responden pada penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Idil. (2021). Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 244-254
- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., dan Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569-580
- Gandryani, F., dan Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 23-41, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>
- Iskak, I., Rusydi, M. Z., Hutauruk, R., Chakim, S., dan Ahmad, W. R. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3), 222-226, <http://dx.doi.org/10.32493/jpdm.v1i3.11431>
- Makmun, A., dan Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19. *Molucca Medica*, 13(2), 52-59, <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52>
- Nugroho, S. A., dan Hidayat, I. N. (2021). Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, 9(2), <https://doi.org/10.33650/jkp.v9i2.2767>
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 197-205, <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.33517>
- Sari, I. P., dan Sriwidodo. (2020). Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19. *Majalah Farmasetika*, 5(5), 204-217, <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i5.28082>
- Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., dan Harjudin, L. (2021). Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 97-110, <https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2158>
- Wibawa, P. A. C. C. G., Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid 19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10-18